

**KINERJA SATUAN TUGAS *SEAPORT INTERDICTION* DALAM  
PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI PELABUHAN BAKAUHENI**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**LIDIYA KARENDA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2017**

## **ABSTRACT**

### **THE WORK PERFORMANCE OF SEAPORT INTERDICTION TASK FORCE IN THE PREVENTION OF ILLICIT DRUGS TRAFICKING IN BAKAUHANI PORT**

**By  
LIDIYA KARENDA**

This research aims to determine the work performance of Task Force (TF) of Seaport Interdiction in the prevention of illicit drugs trafficking in Bakauheni Port. This research is motivated by the problem of abuse and illicit drugs trafficking that never ends, even increasing every year. In order to overcome the problem of illicit drugs trafficking, the government cooperates with the Police, ASDP (transport agency for river, lake, and crossings) and the National Narcotics Agency (BNN) to establish a Seaport Interdiction Task Force in order to prevent illegal drugs trafficking in Bakauheni Port. This research used descriptive qualitative method. The data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. This research applied performance measurement model according to Mahsun, which includes 1) Input, 2) Process, 3) Output, 4) Outcome.

The results of the research indicated that the work performance of Seaport Interdiction Task Force is good enough from the output indicator, it was proven from the decline of illegal drugs trafficking from Sumatra to Java Island by the Seaport Interdiction Task Force. Other findings done by the Seaport Interdiction Task Force was that the input is inadequate, it could be seen from the lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure and also small budget. The researcher recommended that the Seaport Interdiction Task Force and the District Police (Polres) of South Lampung: (1) Need to increase the number of personnel or members of Seaport Interdiction Task Force; (2) need to increase the number of supporting facilities and infrastructures; (3) need to increase the budget to optimize the work of Seaport Interdiction Task Force.

**Keywords: Performance, Seaport Interdiction Task Force, Illicit Circulation of Drugs.**

## **ABSTRAK**

### **KINERJA SATUAN TUGAS *SEAPORT INTERDICTION* DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PELABUHAN BAKAUHENI**

**Oleh  
LIDIYA KARENDA**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja Satgas (Satuan Tugas) *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak pernah usai, bahkan semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah peredaran gelap narkotika ini Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian, ASDP dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membentuk Satgas *Seaport Interdiction* dalam rangka melakukan pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model pengukuran kinerja menurut Mahsun, yang meliputi 1) Masukan (*Input*), 2) Proses (*Process*), 3) Keluaran (*Output*), 4) Hasil (*Outcome*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Satgas *Seaport Interdiction* berjalan cukup baik dilihat dari indikator *output* yang mereka hasilkan, karena dengan adanya Satgas *Seaport Interdiction* dapat mengurangi peredaran gelap narkotika dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Hasil temuan lain Satgas *Seaport Interdiction* dari sisi *input* kurang memadai, dilihat dari minimnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang diperoleh. Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk Satgas *Seaport Interdiction* dan Polres Lampung Selatan yaitu : (1) Perlu penambahan jumlah personil atau anggota Satgas *Seaport Interdiction*; (2) Perlu penambahan jumlah sarana dan prasarana penunjang; (3) Perlu penambahan anggaran untuk memaksimalkan kegiatan Satgas *Seaport Interdiction*.

**Kata Kunci : Kinerja, Satgas *Seaport Interdiction*, Peredaran Gelap Narkotika.**

**KINERJA SATUAN TUGAS *SEAPORT INTERDICTION* DALAM  
PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI PELABUHAN BAKAUHENI**

Oleh  
**LIDIYA KARENDA**

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **KINERJA SATUAN TUGAS SEAPORT  
INTERDICTION DALAM PENCEGAHAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI  
PELABUHAN BAKAUHENI**


Nama Mahasiswa : **Lidiya Karensa**


No. Pokok Mahasiswa : 1316041041

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**  
NIP 19710615 200501 1 003

  
**Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.**

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
**Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP 19691103 200112 1 002

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

**Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.** .....

**Sekretaris : Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.** .....

**Penguji Utama : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.** .....



**Dr. Sa'rief Makhya**

0590803 198603 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 22 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,



Lidiya Karensa

NPM. 1316041041

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Lidiya Karensa, dilahirkan di Kalianda, Lampung Selatan pada tanggal 30 Mei 1995, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mulyadi Yakub dan Ibu Halimah. saat ini, peneliti tinggal di Jl. Kesuma Bangsa Gg. Karbela No. 38 Kalianda, Lampung Selatan. Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Depag diselesaikan pada tahun 2001, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Kalianda pada tahun 2007, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Kalianda pada tahun 2010, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMA Negeri 1 Kalianda pada tahun 2013, selama menempuh pendidikan SMA penulis aktif dalam kegiatan OSIS, ekstrakurikuler basket, dan terpilih dalam kegiatan kemitraan di SMA 1 Godean Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang diterima melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus selama 60 hari.

.



## *MOTO*

*“Tidak ada jaminan untuk sebuah kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan”  
(Bill Clinton)*

*“Manusia dibentuk dari keyakinannya, apa yang iya yakini itu lah dia”  
(Bhagavad Gita)*

*“Karena sesungguhnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Surat Al-Insyirah)*

*“Titik awal dari semua prestasi adalah keinginan”  
(Lidiya Karensa)*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan Rahmad Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

*Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:*

*Kedua orangtua dan adik-adik ku tercinta*

*Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang, kesabaran dan do'a yang selalu dipanjatkan tanpa henti untuk keberhasilan dan suksesanku.*

*Keluarga besar serta teman-temanku*

*Yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepadaku.*

*Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung*

*Yang selalu memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik di masa depan.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi dengan judul **“KINERJA SATUAN TUGAS *SEAPORT INTERDICTION* DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PELABUHAN BAKAUHENI”** yang penyajiannya tersusun secara sistematis dan mendalam. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P dan Ibu Urip Mulyati selaku Rektor Universitas Lampung yang selalu memberikan saran, nasehat, dukungan dan menjadi inspirasi penulis untuk lebih sukses lagi kedepannya.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Noverman Duadji., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung
4. Ibu Intan Fitria., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung.
5. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga segala

keihklasan dan ketulusan bapak dalam membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

6. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., MPA., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terimakasih untuk ilmu, waktu, nasihat, serta saran yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, semoga segala keihklasan dan ketulusan ibu dalam membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
7. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembahas dan dosen pembimbing akademik penulis. Terimakasih atas waktu, tenaga, bimbingan dan segala saran dan masukan yang diberikan, semoga segala keihklasan dan ketulusan ibu dalam membimbing serta mendidik saya selama ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh pada saat perkuliahan dapat menjadi bekal berharga dan bermanfaat dalam kehidupan penulis ke depannya.
9. Ibu Nur'aini dan Bapak Azhari sebagai Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar memberikan pelayanan bagi penulis berkaitan dengan administrasi dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak AKBP Adi Ferdian Saputra, SIK., MH, selaku Kapolres Lampung Selatan dan Bapak IPTU M. Ari Satriawan, SH selaku Kasat Res Narkoba serta seluruh anggota Sat Res Narkoba dan *Seaport Interdiction* yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua orang tuaku Papa Mulyadi Yakub dan Mama Halimah, terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada hentinya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Papa dan Mama senantiasa sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Kedua adikku, Yoga Aditya Nugraha dan Widiya Wira, Terimakasih atas segala bantuan dan do'a, serta dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
13. Keluarga Besar Penulis Keluarga H. Hamid dan Keluarga H. Yakub, (Datuk H. Hamid (Alm), Nenek Hj. Aminah (Almh), Kakek H. Yakub (Alm), Nenek Hj. Nurilis (Almh), Tante, Om serta Sepupu-sepupuku). Terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita.
14. Teman-teman terhebohku, Marchizzya Septyo Enggar Dinata, Citra Kirana, Kikan Kanaya, Ages Larasati, Daniel Chandra, Marcel William, Alexander Ardiago Lim, David, Rega, Ando, Arif yang selalu mendukung, memberikan saran dan selalu menjadi sponsor dikala buntu, keep solid ya .
15. Teman-teman terpanceku, Cici Friska OS dan Devi Permata Sari S.AN terimakasih sudah menjadi teman baikku, menjadi pendengar setia dari semua cerita yang intinya itu-itu aja dan yang tiada hentinya mendukung serta

menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, makasih ya guys, semoga sukses selalu.

16. Teman-teman seperjuangan, Rijkiana Nuansa Antari, Arinta Fitriani Agnes, Ghina Ulfarida, Jita Aryani, Uki Setiani, Yulia Artha dan Kesy Elisabeth terimakasih banyak karena sudah bersedia untuk membantu dan menjawab semua pertanyaan penulis selama masa perkuliahan, semoga sukses selalu kedepannya.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) desa Pungkut Kabupaten Tanggamus (Taria Susandi, SH, Balqis Ananda Putri, S.Si, Adha Arafat Kausar., SH, Radius Uli Arta, Suf Supriadi, dan Abdillah) yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman angkatan 2013, Revardo, Khairunisa, Luse, Nanda, Laras, Rezghi dan seluruh teman-teman ALAS MENARA yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman yang tergabung dalam HIPMI terimakasih atas kekeluargaannya, yang selalu memberikan masukan dan ilmunya serta selalu menginspirasi penulis untuk lebih sukses kedepannya.
20. Mbak Purnama Sari, Mbak Dara Virzinnia, Bang Alan Febrian, Bang Bery Decky Saputra dan lain-lainnya terimakasih atas saran dan dukungannya serta ketersediaannya dalam membantu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Keluarga Besar Himagara terimakasih atas dukungan, kekeluargaan serta kekompakannya.

22. Teman setia dari SD hingga saat ini, Efina Juliani, A.Md., Agung Purnama, Nabil Arya, Amalia Listiani, S.Si., Inas Khairunisa, Fatur Rahman, Antya Rizky, Heri Indra, (Almh) Regia Putri, Rizqi Arismarisa, Azsmar Halim, SH., M.Yusuf Aditya, Rama Amindra, S.Tr., Dina Luciana, Firyal Khairunisa dan Andrean Zaen, sukses terus ya dan semoga tetap kompak untuk kedepannya.
23. Ferdian Anugrah yang selalu sabar dan setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsinya.
24. Teman SMA yang dari dulu sampe sekarang masih suka banyak rencana tapi gak pernah kesampean, Angelia Suny, Dhea Frimaidya, Adinda Riska, Rina Kurnia, Neli Karnita, dan Duwi Oktarini. Kerja dulu shay jangan buru-buru nikah.
25. Sepupu-sepupu cantikku, Medyna Aprilia, Tika Ega Fabella, Siti Pratiwi, Heldaria Anita, Ferinda Sesunan, Amelia, dan masih banyak lagi, terimakasih atas do'a dan dukungan yang kalian berikan.
26. Serta seluruh para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Tiada gading yang tak retak maka saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Aamiin..

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### DAFTAR ISI

#### DAFTAR TABEL

#### DAFTAR GAMBAR

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kinerja .....	11
1. Pengertian Kinerja .....	11
2. Pengukuran Kinerja .....	13
3. Tujuan Pengukuran Kinerja .....	15
4. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja .....	19
5. Manfaat Pengukuran Kinerja .....	21
6. Indikator Kinerja .....	23
B. Tinjauan Tentang Narkoba.....	29
1. Pengertian Narkoba.....	29
2. Jenis-Jenis Narkoba .....	29
3. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.....	32
4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba .....	34
5. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.....	38
C. Kerangka Pikir .....	40

#### BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Teknik Keabsahan Data .....	55



## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Satgas <i>Seaport Interdiction</i> Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan	58
1. Sejarah Singkat .....	58
2. Visi dan Misi .....	60
3. Budaya Organisasi .....	61
4. Struktur Organisasi .....	62
5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	64

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kinerja Satgas <i>Seaport Interdiction</i> Polres Lampung Selatan dalam Mengawasi dan mencegah Peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni.....	67
1. Masukan ( <i>Input</i> ) .....	68
a. Sumber Daya Manusia .....	68
b. Sarana dan Prasarana.....	71
c. Ketersediaan Dana/Anggaran.....	78
2. Proses ( <i>Process</i> ) .....	81
a. Prosedur Pelaksanaan dan Cara Kerja.....	81
b. Ketepatan Waktu .....	86
3. Keluaran ( <i>Output</i> ) .....	87
4. Hasil ( <i>Outcome</i> ) .....	92
a. Pencapaian Tujuan .....	92
b. Dampak Terhadap Masyarakat .....	94
B. Pembahasan.....	96
1. Masukan ( <i>Input</i> ) .....	97
a. Sumberdaya Manusia .....	97
b. Sarana dan Prasarana.....	100
c. Ketersediaan Dana/Anggaran.....	102
2. Proses ( <i>Process</i> ) .....	103
a. Prosedur Pelaksanaan dan CaraKerja .....	104
b. Ketepatan Waktu .....	106
3. Keluaran ( <i>Output</i> ) .....	107
4. Hasil ( <i>Outcome</i> ) .....	109
a. Pencapaian Tujuan .....	109
b. Dampak Terhadap Masyarakat .....	111

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	44
Gambar 2 Struktur Organisasi Sat Res Narkoba dan <i>Seaport Interdiction</i> .....	62
Gambar 3 Pos Pemeriksaan Narkoba Satgas <i>Seaport Interdiction</i> .....	73
Gambar 4 Pos Pemeriksaan Sementara Satgas <i>Seaport Interdiction</i> .....	74
Gambar 5 Kandang dan Anjing Pelacak (K9) .....	76
Gambar 6 Alur Kegiatan Satgas <i>Seaport Interdiction</i> .....	80
Gambar 7 Anggota Satgas <i>Seaport Interdiction</i> melakukan pemeriksaan.....	83
Gambar 8 Pemanfaatan Anjing Pelacak (K9) .....	85
Gambar 9 Hasil Tangkapan dan Barang Bukti Narkoba.....	88
Gambar 10 Barang Bukti Narkoba Yang Akan Dimusnahkan .....	90
Gambar 11 Proses Pembakaran Barang Bukti Narkoba .....	91

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Jumlah Tersangka dan Barang Bukti Narkoba .....	6
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian.....	50
Tabel 3. Daftar Dokumentasi Penelitian .....	51
Tabel 4 Latar Belakang Pendidikan Anggota Satgas <i>Seaport Interdiction</i> .....	69
Tabel 5 Pangkat/Jabatan Anggota Satgas <i>Seaport Interdiction</i> .....	69
Tabel 6 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	72
Tabel 7 Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 .....	78
Tabel 8 Jumlah Penangkapan Tersangka dan Barang Bukti Narkoba .....	88

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan sosial merupakan fenomena yang muncul karena suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur ekonomi dan kebudayaan atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. (Sumber : [https://andykomkom.wordpress.com/2014/12/02/4-faktor-pada-masalah -sosial/](https://andykomkom.wordpress.com/2014/12/02/4-faktor-pada-masalah-sosial/) diakses pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 15.04WIB)

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi empat faktor, pertama yaitu faktor ekonomi, masalah dalam ekonomi biasanya berupa masalah pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Dalam masalah ini biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah kurang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jika masyarakat mengalami permasalahan ini akan mengakibatkan rentannya tindakan kriminalitas di lingkungan masyarakat. Faktor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan maju atau tidaknya suatu negara serta

faktor ekonomi dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat. Kedua faktor psikologis, faktor ini yang sangat berpengaruh terhadap mental ataupun sifat seseorang sehingga bisa terpengaruh oleh pergaulan sekitar masyarakat. Masalah seperti ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Ketiga faktor biologis, faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial yakni kurang gizi, penyakit menular dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Keempat yaitu faktor budaya, dimana kebudayaan yang terus berkembang pesat pada masyarakat akan menjadi peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Misalnya pernikahan pada usia dini, kawin cerai, kenakalan pada remaja dan lain-lain. (*Sumber : <http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-masalah-sosial-dan-contohnya-maupun-penyebabnya.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 15.10 WIB*)

Berdasarkan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial tersebut, dapat dicontohkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti tindak kriminalitas, kekerasan, minum minuman keras, seks bebas, serta yang paling populer saat ini di Indonesia yaitu penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Masalah Narkoba dan Obat-obatan terlarang (narkoba) bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia saat ini, Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan

pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. (*Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*)

Salah satu upaya serta bentuk perhatian pemerintah demi mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 1997. Telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 7) bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Oleh karena itu, segala kegiatan penggunaan narkotika, baik itu menanam, memelihara, menyediakan, memiliki, atau menyimpan, tetapi dalam penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan jelas hal tersebut dilarang. Bagi yang terbukti menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain maka akan dikenakan hukuman pidana maupun denda.

Saat ini, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan. Bahkan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika ditiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peredaran narkotika saat ini sudah sangat meluas dan terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi seperti ini semakin parah dikarenakan banyak sekali ditemukannya kasus penyalahgunaan narkotika khususnya pada golongan remaja, pelajar, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara serta aparat penegak

hukum pun saat ini banyak yang ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini sudah berbagai upaya dilakukan oleh banyak pihak, baik pemerintah, polisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun berbagai pakar serta organisasi yang memiliki perhatian khusus terkait masalah narkotika di Indonesia. Namun, dari sekian banyaknya upaya-upaya yang telah dilakukan ternyata masih belum bisa untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini.

Dalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.

Provinsi Lampung terutama Kabupaten Lampung Selatan merupakan zona merah dalam peredaran gelap narkotika, mengingat bahwa Kabupaten Lampung Selatan merupakan jalur transit dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Hal ini membuat para pengedar narkoba mudah untuk keluar ataupun masuk melalui bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Lampung, tepatnya berada di Kabupaten Lampung Selatan.

Permasalahan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang berat dan kompleks, maka penanganannya memerlukan pendekatan secara komprehensif, terpadu, berkelanjutan dan partisipasi oleh semua pihak. Mengingat rawannya pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai jalur peredaran dan pendistribusian gelap narkoba, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat mencegah, menanggulangi serta memutus rantai peredaran gelap narkoba diantaranya dengan membentuk satuan tugas (satgas) *Seaport Interdiction*.

Satgas *Seaport Interdiction* dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia dan BNN pada tahun 2006 sebagai wadah koordinasi yang berkedudukan di pusat maupun pelabuhan-pelabuhan yang beranggotakan instansi-instansi terkait yang bertugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing (*Collaborative Governance*). Instansi-instansi yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP), Polisi Militer Tentara Republik Indonesia (POM TNI), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Syahbandar serta Pemerintah Daerah (Pemda). Instansi-instansi tersebut masuk ke dalam satu wadah koordinasi yang disebut Satgas *Seaport Interdiction*.

Satgas *Seaport Interdiction* pelabuhan Bakauheni berada di bawah kedudukan BNN, namun pada tahun terbentuknya satgas tersebut Lampung Selatan belum memiliki personil BNN, dan karena kesibukan dari personil dari instansi-instansi yang lain sehingga yang bertugas di Satgas *Seaport Interdiction* sampai saat ini adalah Satuan Reserse (Sat Res) Narkoba Polres Lampung Selatan. Satgas *Seaport Interdiction* menyelenggarakan tugas pokok pencegahan, penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kerjasama nasional serta



melakukan *Interdiction* narkoba melalui pelabuhan penyebrangan, salah satunya Pelabuhan Bakauheni yang merupakan penghubung antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.

Peredaran gelap narkotika dari Pulau Sumatra ke Pulau Jawa dari tahun ke tahunnya semakin mengalami peningkatan. Modus operandi pendistribusian yang dilakukan oleh para sindikat narkoba pun bermacam-macam, diantaranya *body packing*, *swallowed* (ditelan), dan disamarkan /disembunyikan pada barang-barang tertentu seperti mainan anak-anak, kemasan makanan, lukisan, laptop, dan lapisan koper, disembunyikan dalam hasil bumi, memodifikasi alat angkut *truck* dan lain sebagainya.

Tabel dibawah ini merupakan jumlah tersangka dan barang bukti narkoba di Kabupaten Lampung Selatan

**Tabel 1. Jumlah Tersangka dan Barang Bukti Narkoba di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-2016**

No	Jumlah tersangka		Tahun	Jenis barang bukti dan jumlah						
	L	P		Ganja	Sabu	Ekstasi	Obaya	Heroin	Ketamin	Erimin
1.	197	8	2012	9.009.012 kg	4,1 kg	43.051 butir	162.685 butir	-	2 kg	-
2.	189	22	2013	5.336 kg	27 kg	6.904 butir	8.437 butir	2 kg	-	-
3.	198	6	2014	4.800,5 kg	20,2 kg	58.481 butir	162.685 butir	-	-	48.200 butir
4.	283	16	2015	3.837 kg	28,5 kg	2.852 butir	-	-	-	1.749 butir
5.	188	7	2016	105.056 kg	19.875 gram	110.977 butir	-	23 gram	-	-

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2017 (Dokumen Sat Narkoba Polres Lam-Sel)*

Melalui tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba diperkirakan rata-rata lebih dari 200 orang pertahunnya. Jumlah barang bukti yang didapatkan pertahunnya juga bukan merupakan jumlah yang sedikit. Dapat kita lihat pada tahun 2012 jumlah tangkapan barang bukti yang paling menonjol yaitu ganja sebanyak 9.009.012 kg, ekstasi sebanyak 43.051 butir, dan obaya sebanyak 162.685 butir. Kemudian pada tahun 2013 jumlah tangkapan yang paling menonjol yaitu sabu sebanyak 27 kg. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada barang bukti ekstasi yaitu sebanyak 58.481 butir dan erimin sebanyak 48.200 butir. Selanjutnya, pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada barang bukti jenis sabu sebanyak 28,5 kg sedangkan ganja hanya 3.837 kg. dan pada tahun 2016 jumlah barang bukti yang didapat yang paling menonjol yaitu sabu sebanyak 105.056 kg dan ekstasi sebanyak 110.977 butir. Dengan melihat perkembangan kasus penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba tersebut, apabila tidak ada upaya-upaya *preventif* dari pemerintah dan aparat penegak hukum maka dapat dipastikan ketersediaan dan penyalahgunaan narkoba bisa terus meningkat pertahunnya.

Setiap tahunnya jumlah penangkapan tersangka dan barang bukti yang dilakukan oleh Satgas *Seaport Interdiction* selalu berfluktuasi. Pada tanggal 10 Januari 2016 adanya kejadian lolosnya bus antar Provinsi yang menyebrang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pulau Jawa yang membawa 2 kg sabu dan 1.005 butir pil ekstasi yang jika ditafsir senilai Rp. 4 miliar. Bus tersebut lolos dari pemeriksaan anggota *seaport Interdiction* dan tertangkap di Pelabuhan Merak Banten. Atas dasar tersebut, Polda Banten mengamankan sopir. Sebab, dari dalam bus ditemukan barang bukti narkoba yang disembunyikan di bagian dinding toilet

yang ditutup dengan logam dan dibaut. Keberhasilan penyelundupan narkotika tersebut membuktikan bahwa dibalik besarnya hasil tangkapan yang dicapai oleh satgas *seaport Interdiction* setiap tahunnya ternyata masih terdapat beberapa kejadian lolosnya barang selundupan dari pemeriksaan petugas *seaport Interdiction*. (sumber: <http://www.jejamo.com/bus-narkoba-lolos-polres-lampung-selatan-akan-evaluasi-seaport-Interdiction-bakauheni.html> diakses pada tanggal 25 Juni 2016, pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan data pra riset yang diperoleh peneliti, sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Lamsel di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni masih belum maksimal sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang lolos pemeriksaan. Dengan keadaan alat pendeteksi narkotika GT 100 yang belum bisa digunakan dan anjing pelacak (K-9) yang sudah tidak produktif lagi, maka para anggota *Seaport Interdiction* melakukan pemeriksaan hanya dengan insting / naluri saja.

Dengan minimnya proses pemeriksaan yang dilakukan satgas *Seaport Interdiction* saat ini maka akan mempersulit para personilnya untuk melakukan pemeriksaan di pintu gerbang pelabuhan Bakauheni tersebut. Disisi lain, hal ini tentu semakin mempermudah keluar masuknya jaringan peredaran gelap narkotika dalam melakukan aksi menyebarluaskan barang haram tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah peneliti sampaikan tersebut maka penting untuk dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana kinerja Satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di pelabuhan Bakauheni. Serta untuk mengetahui lebih lanjut apa saja

kendala yang dihadapi oleh Satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni baik dari segi lingkungan, fasilitas, proses pemeriksaan, dan lain lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Satuan Tugas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kinerja Satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup administrasi negara, yaitu evaluasi kinerja organisasi sektor publik. Terutama tentang evaluasi kinerja satgas *seaport Interdiction* dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni.
2. Secara praktis, Penelitian ini dapat berguna bagi Polres Lampung Selatan, Sat Res Narkoba Lampung Selatan, serta para pembaca, dan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Kinerja**

#### **1. Pengertian Kinerja**

Sangatlah sulit untuk menetapkan suatu definisi kinerja yang dapat memberikan pengertian yang komprehensif. Penggunaan kata kinerja sendiripun kadang-kadang disamaartikan dengan prestasi kerja, efektivitas kerja, hasil kerja, pencapaian tujuan, produktifitas kerja dan berbagai istilah lainnya. Sesungguhnya ada persamaan pengertian kinerja dengan berbagai istilah tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan pengertian dasarnya maupun prosesnya.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan ciri organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkatan keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau terget-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya, Mahsun (2006:25).

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung-jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi.

Menurut Kusriyanto dalam Mangkunegara (2005:9) kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam). Sedangkan menurut Gomes dalam Mangkunegara (2005:9) kinerja karyawan merupakan ungkapan seperti *output*, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Selanjutnya, definisi kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2005:9) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh sumber daya manusia tersebut persatu periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2012:186) kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kinerja berasal dari pengertian *performance*, namun ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja organisasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi.

## **2. Pengukuran Kinerja**

Kinerja berkaitan erat dengan penilaian dan pengukuran, dimana mengukur suatu kinerja merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui pengukuran yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi tersebut.

Menurut Robertson dalam Mahsun (2006: 25) Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sementara menurut Lohman dalam Mahsun (2006:25) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker dalam Mahsun (200:25) menjelaskan bahwa



pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja adalah proses penilaian dan pelaksanaan tugas oleh seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu pengukuran kinerja yaitu merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang akuntabilitasi.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

### 3. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Adapun tujuan umum pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk menentukan kontribusi suatu bagian dari perusahaan terhadap organisasi secara keseluruhan.
- b. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja masing-masing manajer.
- c. Memotivasi para manajer untuk mengoperasikan divisinya secara konsisten sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan.

Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012: 187) mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Untuk itu sistem pengukuran kinerja harus memenuhi tuntutan sebagai berikut:

- a. Sistem tersebut harus mencerminkan pemahaman organisasi yaitu sistem pengukuran kinerja harus memonitor kinerja organisasi dan menggiring kinerja dalam tujuan utama organisasi.
- b. Sistem pengukuran kinerja harus mengukur aspek kritis yang penting atau perbedaan-perbedaan dari kinerja organisasi untuk mencapai tujuan utama.

Secara lebih spesifik, tujuan dari pengukuran kinerja sebagaimana dikemukakan Mahmudi (2010:14) adalah:

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pemimpin dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.

Menurut Atkinson dalam Mahmudi (2010:14) jika ditinjau dari prespektif pengendalian internal, sistem pengukuran kinerja didesain untuk memonitor implementasi rencana-rencana organisasi, menentukan kapan rencana tersebut berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja digunakan untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur dan melaporkan kinerja, serta untuk memahami bagaimana proses kinerja mempengaruhi pembelajaran organisasi. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan oprasional organisasi, yang dapat diatasi dengan menyesuaikan proses yang ada, dan mengindikasikan permasalahan-permasalahan yang lebih mendasar dan membutuhkan penyesuaian strategi organisai.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategik organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja

bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sasaran untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak. Proses pengukuran dan penilaian kinerja akan menjadi sasaran pembelajaran bagi semua pegawai organisasi melalui: Refleksi terhadap kinerja masa lalu, evaluasi kinerja saat ini dan identifikasi solusi terhadap permasalahan kinerja saat ini serta membuat keputusan-keputusan untuk memperbaiki kinerja yang akan datang.

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer diperlukan perbaikan kinerja secara terus menerus. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang.

- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan dan promosi atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran.

- e. Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. Hal itu hanya akan berjalan dengan baik apabila organisasi menggunakan manajemen kompensasi berbasis kinerja. Pengukuran kinerja juga mendorong manajer untuk memahami proses memotivasi, bagaimana individu membuat pilihan tindakan berdasarkan pada preferensi, *reward*, dan prestasi kerjanya.

- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelapor informan kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk

meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja, bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik.

#### **4. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja**

Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal ini, penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian dan analisa data hasil pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil pengukuran hal ini merupakan bagian dari elemen pokok pengukuran kinerja. Menurut Mahsun (2006:26-27) terdapat empat elemen pengukuran kinerja organisasi publik, yaitu:

a. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran dan strategi tersebut ditetapkan dengan pedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat di tentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat

b. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran

kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (*critical success factory*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melakukan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja.

c. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi

Jika sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja

yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

## **5. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:33-34) baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik, antara lain:

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.



- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Selain itu, manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut :

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
2. Memotivasi para pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur, menjadi lebih nyata sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun komitmen untuk melakukan suatu perubahan dengan melakukan evaluasi atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Dari beberapa manfaat pengukuran kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat mengarahkan kemajuan dan meningkatkan efektifitas, membangun motivasi, dan memberi imbalan atau penghargaan atas prestasi. Selain itu manfaat pengukuran kinerja juga dapat meningkatkan kegiatan manajemen. Alasannya yaitu karena pengukuran kinerja menyediakan informasi yang penting bagi manajemen. Pengukuran kinerja juga menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang strategis pada saat melakukan evaluasi terhadap kebijakan, praktek manajemen dan metode. Lebih lanjut, pengukuran kinerja juga menyediakan dasar penilaian terhadap staf dan dapat digunakan sebagai sistem pemberian penghargaan.

## 6. Indikator Kinerja

Kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu merupakan simpulan dari indikator kinerja. Indikator kinerja LAN-RI menurut Pasolong dalam Sallya (2014:13) adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Dwiyanto dalam Rahmadhani (2016:15) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

- a. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara *input* dengan *output*.
- b. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2011:102) terdapat tujuh indikator kinerja:

1. Tujuan

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

3. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4. Alat atau sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

5. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi

memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

#### 6. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorog bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.

#### 7. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.

Mahsun (2006:31) memaparkan bahwa organisasi publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Sehingga organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat finansial dan tingkat efisiensi. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
2. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses yaitu

semua kegiatan sistem yang dilakukan melalui proses mengubah *input* menjadi *output* (keluaran) yang berbentuk produk dan/atau jasa.

3. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
4. Kelompok hasil (*outcome*) adalah dampak suatu program kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada *output* karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara *outcome* kegiatan telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome* instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan

panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dan lain-lain).

6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dari beberapa indikator yang dikemukakan ahli tersebut, peneliti menggunakan indikator kinerja menurut Mahsun dalam menilai kinerja Satgas *Seaport Interdiction*. Indikator ini digunakan oleh peneliti karena indikator ini menilai kinerja dari berbagai aspek mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dengan begitu akan didapatkan hasil pengukuran kinerja organisasi yang lebih akurat. Namun dari enam indikator yang dikemukakan oleh Mahsun tersebut, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat indikator, yakni: Indikator Masukan (*input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Keluaran (*Output*) dan Indikator Hasil (*Outcomes*).

## **B. Tinjauan Tentang Narkoba**

### **1. Pengertian Narkoba**

Narkoba disebut juga NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, dapat berpengaruh pada kerja otak (susunan saraf pusat) dan sering kali menimbulkan ketergantungan serta dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis dan fungsi sosial. (*sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*)

### **2. Jenis-Jenis Narkoba**

Dalam penggolongannya terdapat beberapa jenis-jenis narkoba yaitu:

#### **a. Narkotika**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika disebut bahwa istilah narkotika diartikan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 22/1997 Tentang Narkotika) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 disebutkan bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam



terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja, Putaw (Heroin tidak murni berupa bubuk)

- 2) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, *petidin* dan turunannya.
- 3) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *codein* dan turunannya

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997).

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997, narkoba jenis psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu::

1. Golongan I sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan selain untuk ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga dilarang keras digunakan atau diedarkan di luar ketentuan hukum. Contoh ekstasi (MDMA) dan (LSD) yang banyak disalahgunakan.

2. Golongan II berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan dengan cara selektif dan digunakan pada pengobatan. Contoh Ritalin *amfetamin* dan *metamfetamin*
  3. Golongan III mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: amorbarbital, brupronorfina, dan mogadon (sering disalahgunakan).
  4. Golongan IV, mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: diazepam, nitrazepam, lexotan (sering disalahgunakan), pil koplo (sering disalahgunakan), obat penenang (sedativa), dan obat tidur (hipnotika).
- c. Zat Adiktif Lain

Zat Adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan sampai pada dependensi (*dependency*) yaitu ketergantungan, misalnya zat atau bahan yang tergolong *amphetamine*, *sedativa/hipnotika*, termasuk tembakau atau rokok. zat psikoaktif lain adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh terhadap kerja otak, yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Alkohol pada minuman keras, terdiri dari golongan A dengan kadar etanol 1-5%, contoh bir golongan B dengan kadar etanol 5-20%, contoh sebagai jenis minuman anggur golongan C dengan kadar etanol 20-45%, contoh *Whiskey*, *Vodka*, *TKW*, *Mansion House*, *Johny Walker*, dan *Kamput*.

- 2) *Inhalasi* atau *Solven*, yaitu gas atau zat pelarut yang mudah menguap berupa senyawa organik yang sering digunakan untuk berbagai keperluan industri, kantor, bengkel, toko, dan rumah tangga, seperti lem, *thiner*, *acetone*, *aerosol*, bensin. Zat ini disalahgunakan dengan cara dihirup, terutama pada anak usia 9-14 tahun.
- 3) Nikotin terdapat pada tembakau. Rokok mengandung 4.000 zat. Yang paling berbahaya adalah nikotin merupakan bahan penyebab ketergantungan.

### **3. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakainya dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada keadaan fisik, psikis maupun keadaan sosial seseorang, adapun bahaya tersebut yaitu:

a. Secara Fisik :

- 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologi*) seperti : penanahan (*abses*), alergi.
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.

- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Akan berakibat fatal apabila terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. over dosis dapat menyebabkan kematian.
- 7) Dampak kesehatan reproduksi pada remaja laki-laki dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kadar hormon testosteron, penurunan dorongan seks, disfungsi ereksi, hambatan ejakulasi, pengecilan ukuran penis dan gangguan sperma.
- 8) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan terjadi penurunan dorongan seks, gangguan pada hormon estrogen dan progesteron, kegagalan orgasme, hambatan menstruasi, pengecilan payudara, gangguan sel telur, serta pada wanita hamil dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga bayi yang dilahirkan juga dapat kekurangan gizi, berat badan bayi rendah, bayi cacat serta dapat menyebabkan bayi keguguran.
- 9) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

b. Secara Psikologi

- 1) Kerja menjadi lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah.
- 2) Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

c. Secara Sosial

- 1) Gangguan mental
- 2) Anti-sosial dan asusila
- 3) Dikucilkan oleh lingkungan
- 4) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- 5) Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram.

#### **4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Faktor penyebab resiko menggunakan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak sekolah maupun pemuda adalah pertama kali hanya sekedar ingin mencoba karena pergaulan lingkungan yang kurang baik dan contoh dari teman-temannya. Rasa ingin mencoba narkotika inilah yang menjadi pintu masuk pertama dan penyebab kalangan muda terjerumus dalam pengaruh dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya.

Berikut beberapa cara menghindari narkoba yang dilansir dalam website Badan Narkotika Nasional (BNN) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter.
- b. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba.
- c. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika.

- d. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga atau pun mengikuti kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita.
- e. Selalu ingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalah guna Narkoba, apalagi bagi pengedar Narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Bersantailah dengan keluarga, berkaraoke, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama nonton bersama keluarga.
- g. Bila mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian.

Selain itu terdapat pula beberapa cara, kiat atau tips pencegahan dan menghindari penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya serta NAPZA Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menurut BNN antara lain :

- a. Menanamkan Sejak Dini Akan Arti Makna Hidup Sehat

Bila seseorang telah terjerumus pada penggunaan narkoba maka akan sulit untuk melepas dari jeratan narkotika ini. Membutuhkan waktu kesabaran ketekunan dan rehabilitasi yang baik dan tepat pada korban-korban narkotika. Contoh perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari dalam mempraktekkan hidup sehat juga perlu dilakukan. Orang tua seyogyanya menjadi role-model bagi anak-anak mereka, harus memberikan contoh yang baik bila ingin anaknya berperilaku baik. Sering kali kita sebagai orang tua lupa bahwa anak kita belajar dari tingkah laku dan perilaku kita yang mereka lihat dan perhatikan setiap harinya dari bayi sampai remaja. Anak-anak kita

belajar, meniru, dari orang yang sehariannya berada paling dekat dengan mereka. Maka seharusnya kita tidak merokok atau minum minuman beralkohol bila kita tidak mau anak-anak kita meniru kita atau bahkan mencoba-coba dan menyalahgunakan narkoba.

b. Informasi Yang Benar Tentang Bahaya Narkoba

Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ini kepada anak-anak generasi muda kita sebelum anak-anak mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang salah atau malah sebaliknya. Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Seperti informasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ-organ tubuh kita serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba, dan penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian narkoba.

c. Peduli Pada Lingkungan Sekitar

Orang tua selalu tanggap lingkungan di rumah mereka sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak. Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada narkoba, atau yang sudah terpengaruh akibat dampak kecanduan narkoba. Orang tua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri tanda anak mulai menggunakan narkoba sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya.

d. Bekerjasama Dengan Lingkungan Rumah

Kita sebaiknya bekerjasama dengan lingkungan rumah kita seperti dengan ketua RT, RW, dsb. Terutama dengan tetangga yang mempunyai anak seusia atau yang lebih tua dari anak kita. Menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga selalu mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kita. Kita bisa membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada anak-anak di RT kita yang disinyalir menggunakan narkoba. Bila sistem yang dibangun bersama para tetangga itu kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik

e. Menjalin Hubungan Interpersonal Yang Baik

Hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan dan juga dengan anak-anak kita, akan memungkinkan kita melihat gejala-gejala awal pemakaian narkoba pada anak-anak kita. Kedekatan hubungan batin dengan orang tua akan membuat anak merasa nyaman dan aman, menjadi benteng bagi keselamatan mereka dalam mengarungi kehidupan mereka nanti. Bila orang tua sering ribut, cekcok, maka itu bisa memengaruhi sang anak secara psikologis. Kegagalan ini bisa memancingnya untuk mencoba narkoba dengan berbagai macam alasan yang dicarinya sendiri. Misalnya supaya diperhatikan, sikap masa bodoh terhadap hidupnya, untuk mengatasi kemarahan, ketidaksenangan, atau kesedihan yang timbul dari melihat orang tua mereka yang selalu bertengkar.



Dari beberapa upaya yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pencegahan dari bahaya narkoba maka perlunya perhatian orang tua terhadap tingkahlaku anak dalam bergaul dan perlunya untuk menanamkan arti hidup sehat serta bahaya penggunaan narkoba sedini mungkin, dan kitapun harus pandai-pandai dalam memilih teman dalam bergaul, karena teman dan lingkungan dapat membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kita.

## **5. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba**

Bahaya penggunaan narkoba dapat menyebar keseluruh lapisan masyarakat apabila dibiarkan begitu saja, pencegahan merupakan upaya yang sangat penting untuk melindungi remaja dari bahaya narkoba untuk itu diperlukan beberapa cara untuk menanggulangi masalah tersebut, berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba:

### **a. Promotif ( pembinaan)**

Ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkoba, prinsipnya adalah meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. dengan pelaku program adalah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

### **b. Preventif (program pencegahan)**

Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif bila dibantu oleh lembaga propesional terkait, lembaga swadaya

masyarakat dan organisasi masyarakat. Bentuk kegiatan preventif yang dilakukan dapat berupa kampanye/sosialisasi anti penyalahgunaan Narkoba dengan memberikan informasi satu arah tanpa tanya jawab, hanya memberikan garis besarnya, dangkal dan umum, disampaikan oleh toma, ulama, seniman, pejabat bukan tenaga profesional. Dapat juga dengan menggunakan poster, brosur atau baliho. Dengan misi melawan penyalahgunaan narkoba tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

c. Kuratif (pengobatan)

Ditujukan kepada para pengguna narkoba, tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. tidak sembarangan orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pengobatan harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Bentuk kegiatan kuratif yaitu:

- a) Penghentian pemakaian narkoba.
- b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba.
- c) Pengobatan terhadap organ tubuh akibat penggunaan narkoba.
- d) Pengobatan terhadap penyakit yang masuk bersama narkoba (penyakit tidak langsung yang disebabkan oleh narkoba) seperti HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, pneumonia, dan lain-lain.

d. Rehabilitatif

Upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalankan program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba, Pemakai narkoba dapat mengalami penyakit ikutan berupa:

- a) Kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain).
- b) Kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif .
- c) Penyakit- penyakit ikutan.

e. Represif

Program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.

### **C. Kerangka Pikir**

Maraknya peredaran dan pendistribusian gelap narkoba yang masuk ke Provinsi Lampung menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni merupakan masalah yang seakan tidak ada habisnya. Hal ini dikarenakan Pelabuhan Bakauheni merupakan jalur transit dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa sehingga membuat para pengedar narkoba semakin mudah untuk keluar ataupun masuk melalui Pelabuhan Bakauheni.

Karena permasalahan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang berat dan kompleks, maka penanganannya memerlukan pendekatan secara

komprehensif, terpadu, berkelanjutan dan partisipasi oleh semua pihak. mengingat rawannya pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai jalur peredaran dan pendistribusian gelap narkoba, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat mencegah, menanggulangi serta memutus rantai peredaran gelap narkoba diantaranya dengan membentuk satuan tugas (satgas) *Seaport Interdiction*.

Jumlah penangkapan yang didapat oleh satgas *Seaport Interdiction* selalu mengalami kenaikan dan penurunan tetapi masih dalam batas wajar dan selalu mendapatkan hasil tangkapan yang besar setiap tahunnya. Namun, dibalik besarnya hasil tangkapan yang dicapai oleh satgas *Seaport Interdiction* setiap tahunnya ternyata masih terdapat beberapa kejadian lolosnya barang selundupan dari pemeriksaan petugas *Seaport Interdiction*.

Berdasarkan data pra riset yang diperoleh peneliti, sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Lamsel di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni memang masih belum maksimal sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang lolos pemeriksaan, karena dengan keadaan sarana prasarana yang sudah tidak mendukung, maka para anggota *Seaport Interdiction* melakukan pemeriksaan hanya dengan penciuman dan insting saja.

Dengan minimnya proses pemeriksaan yang dilakukan satgas *Seaport Interdiction* saat ini maka akan mempersulit para personilnya untuk melakukan pemeriksaan di pintu gerbang pelabuhan Bakauheni tersebut. Disisi lain, hal ini tentu semakin mempermudah keluar masuknya jaringan peredaran gelap narkoba dalam melakukan aksi menyebarkan barang haram tersebut.

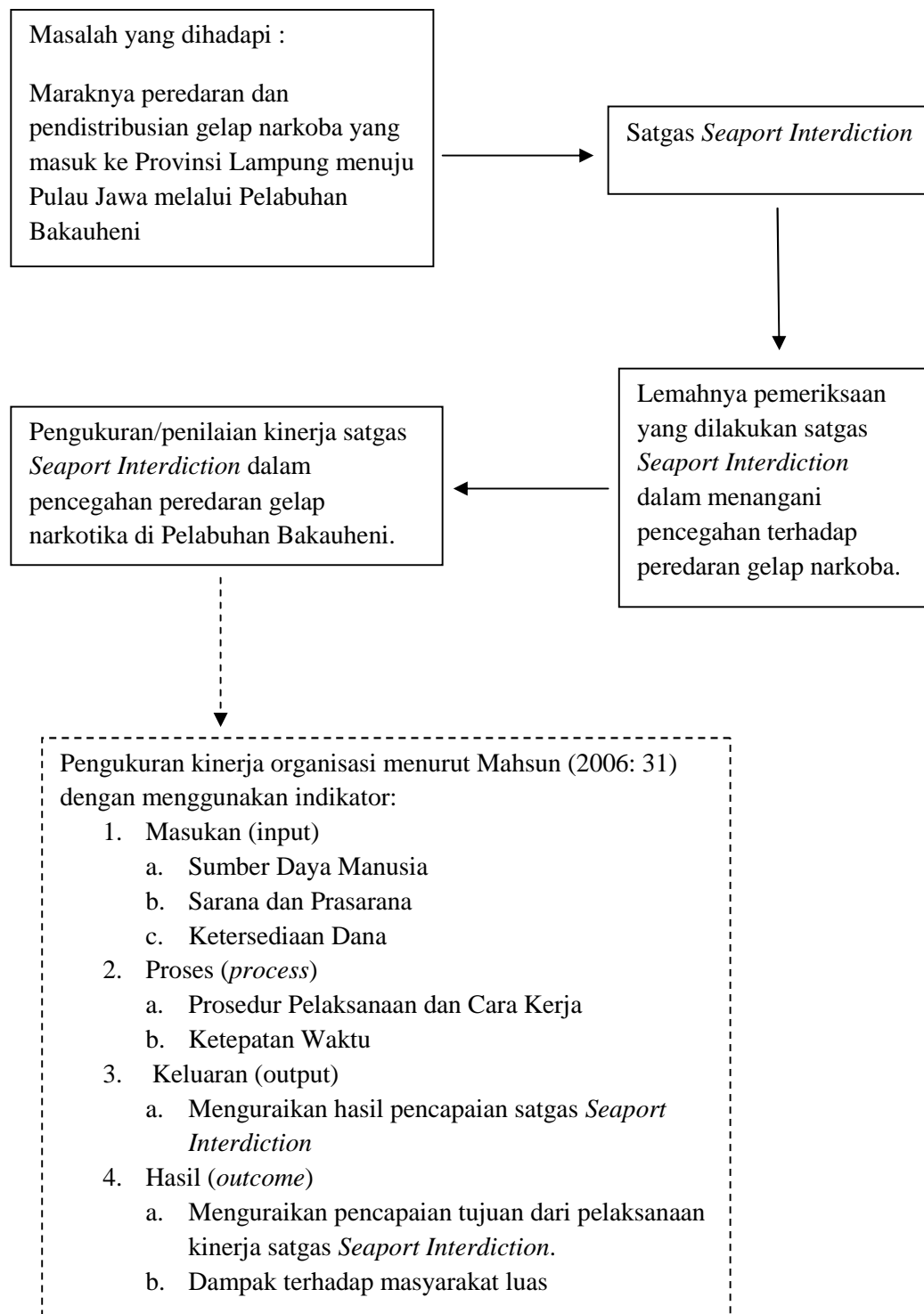
Berangkat dari masalah tersebut, untuk melihat sejauhmana keberhasilan pencegahan yang dilakukan oleh satgas *Seaport Interdiction* dan kendala apa saja yang dihadapinya, maka perlu untuk dilakukan pengukuran/penilaian kinerja satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika. Dalam melakukan penilaian kinerja tersebut digunakan indikator kinerja organisasi publik menurut Mahsun (2006: 31) yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), proses (*process*), hasil (*outcome*) merupakan indikator yang tepat untuk digunakan dalam mengukur kinerja satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator ini didalam penelitian.

Indikator masukan (*input*) yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Melalui indikator ini yang menjadi ukuran adalah jumlah pegawai, sarana dan prasarana dan ketersediaan dana yang digunakan dalam pencegahan peredaran gelap narkotika. Proses (*process*) merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, mupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang menjadi ukuran dalam indikator ini yaitu cara kerja dan standar ketepatan waktu dalam penanganan kasus peredaran gelap narkotika.

Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Dalam hal ini yang menjadi keluaran (*output*) dalam penelitian ini yaitu menguraikan hasil pencapaian satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni. Indikator hasil (*outcome*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

menengah yang mempunyai efek langsung. Dalam penelitian ini keluaran kegiatan (*output*) nya adalah menguraikan hasil pencapaian satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni, dengan demikian hasil yang diharapkan yakni tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pencegahan narkoba yang dilakukan satgas *Seaport Interdiction*.

Dengan menggunakan model indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dilihat bagaimana kinerja satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni. Apakah masalah-masalah terkait peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakaheni telah ditangani dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja satgas *Seaport Interdiction*. Untuk lebih mudah memahami inti dari penelitian ini, maka peneliti menggambarkan dalam bentuk kerangka pikir.



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah Penulis 2017*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Data yang digunakan dalam jenis penelitian ini merupakan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong 2013:11).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek



penelitian, sedangkan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat, mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis fenomena tertentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa nyata yang terjadi di lapangan melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumentasi sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh terkait dengan Evaluasi Kinerja Satgas *Seaport Interdiction* Dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Pelabuhan Bakauheni.

## **B. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian, informasi yang terdapat dilapangan dapat dipilih sesuai dengan kajian permasalahan. Karena organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat finansial dan tingkat efisiensi saja maka peneliti menggunakan indikator pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006:31) untuk mendeskripsikan kinerja satgas *Seaport Interdiction*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Satuan Tugas *Seaport Interdiction* Dalam Penanganan Peredaran Gelap Narkotika di Pelabuhan Bakauheni yang diukur melalui beberapa indikator, yakni:

a. Masukan (*Input*)

Indikator masukan mengukur sumber daya manusia, peralatan, bahan, kebijakan dan waktu yang dibutuhkan agar pelaksanaan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Ukuran dalam indikator ini yaitu:

- a) Jumlah pegawai yang ada dalam menangani kasus peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.
- b) Jumlah sarana dan prasarana yang ada dalam penanganan kasus peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.
- c) Ketersediaan dana untuk menunjang kinerja satgas *Seaport Interdiction*.

b. Proses (*Process*)

Indikator ini mengukur upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Ukuran dalam indikator ini yaitu:

- a) Menguraikan cara kerja *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.
- b) Menguraikan ketepatan waktu dalam penanganan kasus peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.

c. Keluaran (*Output*)

Merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, baik itu berupa barang ataupun jasa. Dalam indikator ini ukuran yang digunakan untuk mengukur keluaran (*Output*) yaitu dengan cara menguraikan hasil pencapaian satgas *Seaport Interdiction* dalam menangani kasus peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.

d. Hasil (*Outcomes*)

Merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Dalam penelitian ini hasil (*outcome*) yang akan diukur adalah

- a) Menguraikan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh satgas *Seaport Interdiction*.
- b) Dampak terhadap masyarakat luas atas kinerja satgas *Seaport Interdiction*.

2. Faktor penghambat / kendala yang dihadapi Satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkoba di pelabuhan Bakauheni.

### C. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dan Kantor Satgas *Seaport Interdiction* di Pelabuhan Bakauheni. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sat Narkoba Polres Lampung Selatan merupakan instansi yang mengepalai *Seaport Interdiction*, serta memiliki tugas dan fungsi sebagai badan yang bertugas dalam melakukan pengawasan, penyidikan, pemeriksaan, serta sebagai tempat pengaduan bagi masyarakat tentang pergerakan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang. Selain itu banyak juga yang menjadi faktor pendukung seperti letak geografis Polres Lampung Selatan merupakan yang paling ideal dan paling dekat sehingga mempercepat untuk proses penanganan setelah penangkapan, dan kinerja Sat Narkoba Polres

Lampung Selatan dinilai sangat baik dan unggul dalam hal melakukan penangkapan.

2. Kantor satgas *Seaport Interdiction* di Provinsi Lampung hanya ada di Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Pelabuhan Bakauheni.
3. Anggota *Seaport Interdiction* bertugas melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang yang diduga membawa / mengangkut narkoba yang melewati jalur pelabuhan penyeberangan Bakauheni di pos pemeriksaan *Seaport Interdiction*.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi. Data yang diperoleh belum mampu memberikan manfaat bagi penerima data sehingga diperlukan proses pengolahan pada data agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi penerimanya. Data dapat berbentuk angka, gambar dan suara.

##### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder.

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen.

## 2. Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang terpilih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti, berikut merupakan daftar narasumber yang di wawancarai :

**Tabel 2. Daftar Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>
1	IPTU M. Ari Satriawan, MH	Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan	10 Agustus 2017
2	IPDA M. Abdul Latif, STK	Kaur Bin Ops	10 Agustus 2017
3	AIPTU Soedarminto	Komandan Regu I	12 Agustus 2017
4	AIPTU Buyung Kurnia	Komandan Regu II	16 Agustus 2017
5	BRIPKA Beni Irawan	Komandan Regu III	11 Novembaer 2017
6	BRIPTU Alfian Zefriandi	Anggota Regu I	12 Agustus 2017
7	BRIPKA Parlindungan S	Anggota Regu II	16 Agustus 2017
8	BRIPKA Hermawan Utoyo	Anggota Regi III	11 Novembaer 2017
9		Masyarakat	11 Novembaer 2017

*Sumber: olahan data peneliti*

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Melalui teknik ini data yang didapatkan oleh peneliti yaitu keadaan lokasi penelitian, kegiatan manusia terkait penelitian, dan situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati kegiatan anggota *Seaport Interdiction* dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba di pelabuhan bakauheni. Selain itu hal yang ingin peneliti ketahui adalah faktor internal dan eksternal yang diindikasikan sebagai faktor penghambat maupun pendorong kinerja Satgas *Seaport Interdiction* dalam mengawasi peredaran gelap narkoba.

c. Dokumen-Dokumen

Menurut Moleong (2013: 216) Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis. Data yang terkandung dalam dokumen dapat dijadikan sebagai bahan untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 3. Daftar Dokumentasi Penelitian**

No	Nama Dokumen
1.	Data Ungkap Kasus Narkoba Polres Lampung Selatan 2014
2.	Data Ungkap Kasus Narkoba Polres Lampung Selatan 2015
3.	Data Ungkap Kasus Narkoba Polres Lampung Selatan 2016
4.	Data Jumlah Pegawai dan Struktur Satuan Tugas
5.	Visi, Misi, Tujuan
6.	Pendanaan
7.	Standard Operating Procedure

*Sumber: Data Sat Narkoba Polres Lampung Selatan*

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, terdapat tiga kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*), dan tahap pengumpulan data (*logging the data*).

Tahap-tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Proses memasuki lapangan (*getting in*)

Untuk memasuki lokasi penelitian, hal yang pertama dilakukan peneliti adalah membuat surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNILA sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian. Surat pengantar tersebut diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung untuk meminta surat izin formal penelitian dikarenakan Kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan dan Kantor *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni merupakan Badan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Setelah mendapatkan izin, peneliti kemudian menemui dan memperkenalkan diri pada informan yang ada di Kantor Sat narkoba Polres Lampung Selatan dan Kantor *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni.

### 2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*getting along*)

Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk meleburkan diri dengan subyek penelitian, serta berusaha untuk mencari dan mendapatkan informasi yang lengkap dan mengambil inti dari informasi yang diterima serta dari fenomena yang diamati.

### 3. Pengumpulan Data (*logging data*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang terpilih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti. Jawaban-jawaban dari informan tersebut kemudian dicatat atau direkam oleh peneliti. Jawaban-jawaban tersebut dicatat dan direkam oleh peneliti dengan menggunakan Handphone. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mencari data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan peneliti yakni data yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Satuan Tugas *Seaport Interdiction* dalam mengawasi peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti berinteraksi langsung terhadap situasi sosial dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung kondisi sebenarnya di Pelabuhan Bakauheni serta melihat langsung prosedur pemeriksaan serta penangkapannya.



## F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:33) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles Huberman dalam Sugiyono (2012:337), teknis analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*).

Yaitu suatu proses merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahan atau diarahkan dari arti data tersebut.

2. Penyajian data (*Data Display*).

Yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data yang telah di organisir kedalam matriks analisis data disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, foto, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam

wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

### 3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh peneliti. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

### 1. Teknik Memeriksa Kredibilitas Data (Derajat Kepercayaan)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria derajat kepercayaan ini berfungsi untuk (a) Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; (b) Mempertunjukkan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Teknik-teknik keabsahan data ini antara lain:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, agar dapat meningkatkan derajat kepercayaan, pengamatan yang dilakukan adalah menguraikan secara rinci bagaimana kinerja satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu. Triangulasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan

memeriksa temuan di lapangan dengan membandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Konsep validitas keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi. Data yang disajikan yakni selain wawancara juga berupa catatan-catatan lapangan, peraturan, dan lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan di hasil dan pembahasan. Pemaparan keseluruhan data dilakukan agar pembaca mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan evaluasi kinerja satgas *Seaport Interdiction* dalam pencegahan peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Kebergantungan dapat dicapai dengan cara memeriksa suatu kebenaran. Berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai semua data yang diperoleh, kemudian diadakan seminar untuk membahasnya.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Kepastian pada penelitian kualitatif berupa penekanan pada data. Jika hasil penelitian ini layak dan memenuhi kriteria, maka hasil penelitian ini dapat digantungkan pada peneliti.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Satgas *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan**

##### **1. Sejarah Singkat Satgas *Seaport Interdiction***

Demi mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, dengan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk selanjutnya disebut UU Narkoba, dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65 Ayat (1) UU Narkoba menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Dan dalam Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota.

Mengingat permasalahan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang berat dan kompleks, maka penanganannya memerlukan pendekatan secara komprehensif, terpadu, berkelanjutan dan partisipasi semua pihak, kerawanan di pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai jalur peredaran dan pendistribusian gelap narkoba tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat mencegah, menanggulangi serta memutus rantai peredaran gelap narkoba diantaranya dengan pembentukan *Satgas Seaport Interdiction*.

*Satgas Seaport interdiction* dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia dan BNN pada tahun 2006 sebagai wadah koordinasi yang berkedudukan di pusat maupun pelabuhan-pelabuhan yang beranggotakan instansi-instansi terkait yang bertugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing (*Collaborative Governance*). Instansi-instansi yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP), Polisi Militer Tentara Republik Indonesia (POM TNI), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Syahbandar serta Pemerintah Daerah (Pemda). Instansi-instansi tersebut masuk ke dalam satu wadah koordinasi yang disebut *Satgas Seaport interdiction*.

*Satgas Seaport interdiction* pelabuhan Bakauheni berada di bawah kedudukan BNN, namun pada tahun terbentuknya satgas tersebut, Lampung Selatan belum memiliki personil BNN, dan karena kesibukan dari personil dan instansi-instansi yang lain sehingga yang bertugas di *Satgas Seaport interdiction* sampai saat ini adalah Satuan Reserse (Sat Res) Narkoba Polres Lampung Selatan. *Satgas Seaport interdiction* menyelenggarakan tugas pokok pencegahan, penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kerjasama nasional serta

melakukan *interdiction* narkoba melalui pelabuhan penyeberangan Bakauheni khususnya dari Sumatera ke Jawa. Pernyataan di atas menandakan adanya koordinasi antara BNN dan Polri dengan *Seaport Interdiction* dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

## **2. Visi dan Misi**

### **VISI**

Mewujudkan postur Satuan Tugas *Seaport Interdiction* yang profesional dan modern dalam penegakkan hukum kejahatan Narkoba, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari perdagangan dan peredaran gelap Narkoba, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

### **MISI**

- a. Menghancurkan sindikat kejahatan Narkoba baik lingkup local maupun interlokal dengan mengungkap pelaku dan jaringannya serta menyita barang bukti Narkoba termasuk sumber keuangan dan aset hasil kejahatan Narkoba.
- b. Mewujudkan Penyidik yang handal dan profesional dalam menangani kejahatan Narkoba.
- c. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar terhindar dari kejahatan Narkoba sehingga terbangun kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berpartisipasi aktif dalam penegakkan hukum.
- d. Membangun sistem informasi kejahatan Narkoba yang berguna untuk merumuskan strategi penanggulangan secara terpadu bersama instansi terkait serta penegak hukum atau kepolisian dari kesatuan lain.

### 3. Budaya Organisasi

Budaya merupakan kombinasi yang bersifat kompleks antara asumsi, perilaku, sejarah, mitos, perumpamaan dan pemikiran lainnya yang saling sesuai untuk mendefinisikan apa yang dimaksud oleh anggota komunitas. Sedangkan budaya organisasi merupakan serangkaian pemahaman seperti norma, nilai, sikap dan kepercayaan yang disebarkan oleh anggota organisasi. Demi membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka Satgas *Seaport Interdiction* mengembangkan nilai-nilai dasar yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya Organisasi tersebut sebagai berikut:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketuntasan dan komitmen yang tinggi.

b. Kredibel

Memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional, maupun internasional.

c. Cepat Tanggap

Tanggap dan cepat bertindak dalam mengatasi masalah.

d. Kerjasama Tim

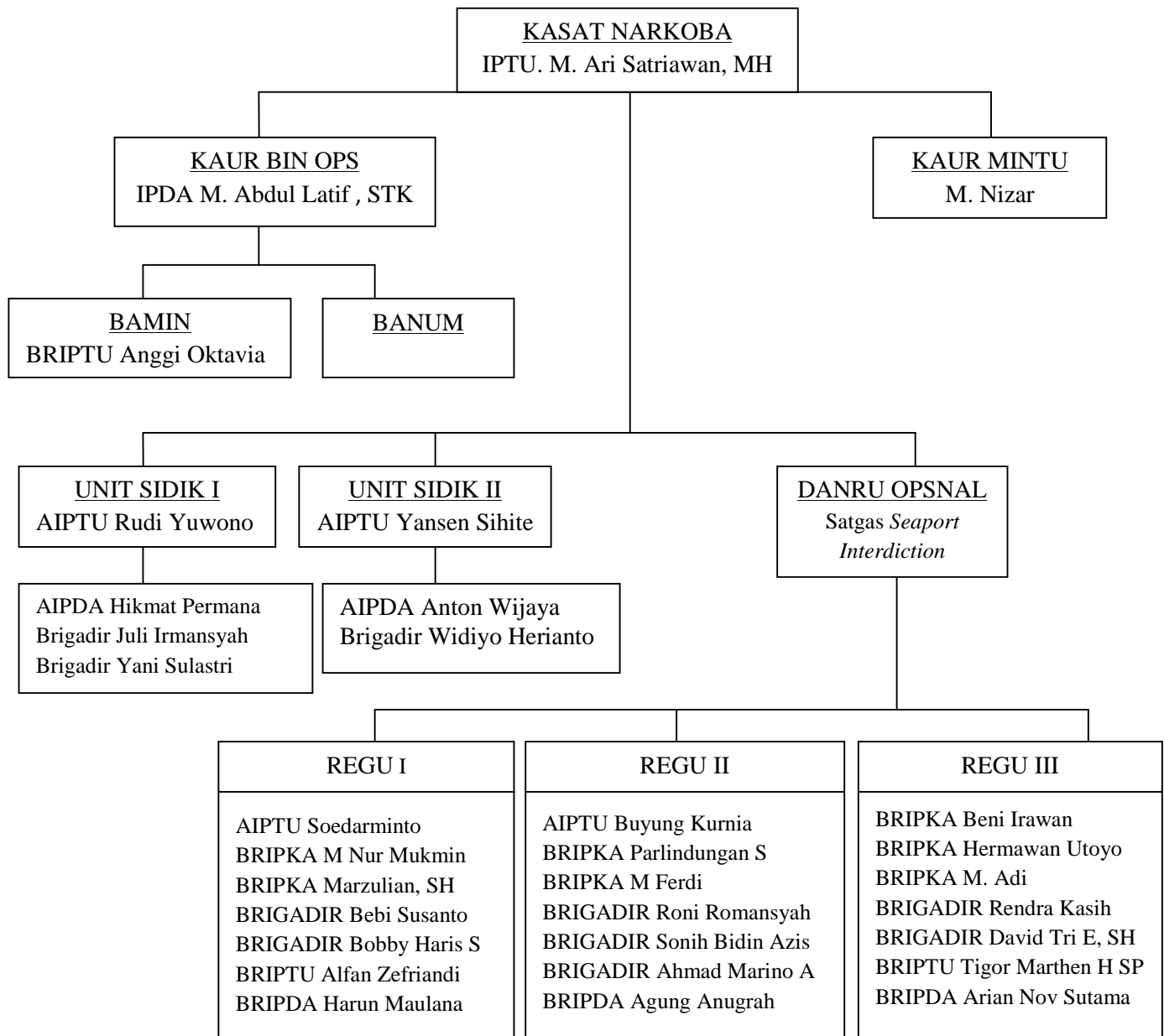
Mengutamakan kerjasama tim

e. Inovatif

Memiliki inovasi yang tinggi.



#### 4. Struktur Organisasi



**Gambar 2. Struktur Organisasi Sat Res Narkoba dan Seaport Interdiction**

*Sumber: Data Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan, Agustus 2017*

Penjabaran terkait tugas dari masing-masing posisi di atas adalah sebagai berikut:

a. Kasat Narkoba (Kepala Satuan Narkoba)

Kasat Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika dan obat – obat berbahaya termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan, penanggulangan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Selaku Kasat Narkoba membuat program kegiatan dalam menaggulangi gangguan kamtibmas, memimpin dan menggerakkan Satuan Narkoba serta melaksanakan pengendalian terhadap segala kegiatan Satuan Narkoba.

b. Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Bidang Operasional)

Bertugas memimpin, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sat Narkoba dan memberikan arahan dalam kegiatan pelayanan penyelenggaraan latihan, termasuk penyiapan / penyusunan kekuatan dan dukungan / bantuan administrasi bagi penyelenggaraan operasional Narkoba. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Sat Narkoba. Mengawasi tugas administrasi Penyidikan Sat Narkoba.

c. Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Resnarkoba dan Satgas Seaport Interdiction, menyusun produk perencanaan dan anggaran, membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggran.

d. Bamin (Bintara Administrasi)

Bertugas membantu melaksanakan tugas ketatausahaan administrasi sehari-hari.

e. Unit Sidik

Bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba, melakukan pemanggilan terhadap sanksi, melakukan penangkapan terhadap pengedar atau pemakai narkoba, melakukan penahanan, penyitaan dan penggeledahan, melakukan pemeriksaan barang bukti ke balai POM atau Ke BNN Pusat, melakukan pemberkasan dan pengiriman berkas ke Kejaksaan Negeri.

f. Danru Opsnal (Komandan Regu Operasional)

Bertugas mengendalikan kegiatan anggotanya, menyusun rencana kerja dan pembagian tugas anggotanya, melakukan apel regu sebelum melakukan tugas, memeriksa kelengkapan dan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap anggota regunya, bertanggung jawab penuh dalam satu periode jaga.

Terkait dalam struktur organisasi diatas, Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, Bapak IPTU Ari Satriawan, SH, MH mengatakan Bahwa :

“Dalam struktur organisasi, Satgas *Seaport Interdiction* masih berada di bawah pimpinan sat res narkoba, yang dimana di dalamnya berisi Kaur Bin Ops, Kaur Mintu, Bamin, Unit Sidik dan Lidik, dimana satgas seaport interdiction sendiri merupakan bagian dari unit lidik Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan”. (hasil wawancara tanggal 10 Agustus 2017).

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk

menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara *Tugas Pokok* dan *Fungsi*. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi Sat Res Narkoba dan satgas *Seaport Interdiction*.

**Tugas Pokok :**

Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) bersama Satgas *Seaport Interdiction* bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

**Fungsi :**

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek, Satresnarkoba Polres dan anggota Satgas *Seaport interdiction*; dan
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil deskripsi serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kinerja Satgas *Seaport Interdiction* Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika di Pelabuhan Bakauheni, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Satgas *Seaport Interdiction* berjalan dengan cukup baik dilihat dari indikator *output* yang mereka hasilkan, hanya saja masih ditemukan kendala pada Satgas *Seaport Interdiction* yang peneliti nilai dari faktor pendukung berjalannya kinerja. Berdasarkan hal tersebut, indikator *input* yang berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran, menjadi temuan kendala dalam kinerja Satgas *Seaport Interdiction*.

Jika dilihat dari banyaknya hasil tangkapan yang seringkali diberitakan di media massa bahwa Satgas *Seaport Interdiction* memiliki kinerja yang cukup baik, hal tersebut dikarenakan tuntutan yang meski terdapat kekurangan didalam satgas tersebut, mereka tetap diharuskan untuk melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencapai target sesuai dengan kode etik kepolisian, jadi meskipun dengan adanya kekurangan tersebut tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk menurunnya kinerja yang mereka hasilkan.

## B. Saran

1. Polres Lampung Selatan seharusnya menambahkan jumlah anggota Satgas *Seaport Interdiction* yang bertugas mengawasi, memeriksa dan mencegah peredaran narkoba di Pelabuhan Bakauheni dan sebaiknya membentuk tambahan regu untuk melakukan razia atau pemeriksaan di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di Bakauheni agar kegiatan pencegahan berjalan optimal dan Satgas *Seaport Interdiction* serta Polres Lampung Selatan seharusnya koordinasi dengan Badan Narkotika Kabupaten Lampung selatan untuk membangun kerja sama yang solid dalam melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni dan sekitarnya.
2. Diperlukan adanya penambahan jumlah unit anjing pelacak (K9) sebagai sarana penunjang kinerja Satgas *Seaport Interdiction* terlebih saat penyebrang sedang ramai seperti hari-hari libur atau hari-hari besar lainnya. Diperlukan juga penambahan alat pendeteksi narkoba, alat tersebut tentu sangat berguna dan dapat menghemat waktu pemeriksaan, hal tersebut diperlukan karena jika terjadi kerusakan alat yang bersifat teknis seperti yang terjadi saat ini dapat ditanggulangi secara cepat, dan perlunya pengadaan pos pemeriksaan yang lebih layak lagi.
3. Perlunya penambahan jumlah dana atau anggaran untuk keberlangsungan kegiatan agar berjalan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPF, Yogyakarta.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pasolong, Herbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sinambela, Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Situmorang Victor M dan Juhir Jusuf. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat (Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo. Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



## **Sumber Lain**

Sallya, Rizka. 2014. *Kinerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal di Provinsi Lampung*. Skripsi

Rahmadhani, Maya. 2016. *Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Kelurahan Way Dadi Baru Pasca Pemekaran Wilayah Kelurahan di Kota Bandar Lampung*. Skripsi

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 19.33 WIB

<http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-masalah-sosial-dan-contohnya-maupun-penyebabnya.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 15.10 WIB

[https://andykomkom.wordpress.com/2014/12/02/4-faktor-pada-masalah -sosial/](https://andykomkom.wordpress.com/2014/12/02/4-faktor-pada-masalah-sosial/) diakses pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 15.04 WIB

Mawandhi, Roy. 2016. "Bus Narkoba Lolos, Polres Lampung Selatan Akan Evaluasi Seaport Interdiction". Ruwajurai. 13 Januari 2016.

Okto, Ricky. 2016. "Sat Narkoba Lamsel Kecolongan?". Lampung Raya. 13 Januari 2016.